

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengendalian Intern**

Pengendalian intern diharapkan dapat menciptakan aktivitas pengendalian yang efektif dan efisien dalam menentukan persediaan yang optimal dimiliki oleh perusahaan, mencegah tindakan pelanggaran dan penyelewengan yang bisa merugikan perusahaan, serta memberikan pengamanan fisik terhadap persediaan dari pencurian dan kerusakan. Pengertian tentang pengendalian intern beraneka ragam, walaupun dari masing-masing definisi tersebut memiliki inti yang sama.

Definisi pengendalian intern menurut Mulyadi (2014:163) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen”.

Sedangkan menurut Hery (2014:11) menyatakan bahwa pengendalian intern adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.”

Sedangkan menurut menurut Krismiaji (2010:218) definisi pengendalian intern adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal (Internal control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen’.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas dapat diartikan bahwa pengendalian internal merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva untuk menghasilkan informasi yang akurat, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi serta mendorong terjadinya kebijakan manajemen.

#### **2.1.1.1 Tujuan Pengendalian Internal**

Menurut Hery (2014:160) tujuan dari pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

- 1) Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan dan kepentingan perorangan.
- 2) Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja atau tidak disengaja (kelalaian).
- 3) Karyawan telah menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Sementara tujuan pengendalian internal menurut Azhar Susanto (2013:88) adalah sebagai berikut:

“Tujuan pengendalian internal yaitu untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan; untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi.”

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa tujuan pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai terkait terkait pencapaian tujuan perusahaan.

#### **2.1.1.2 Indikator Pengendalian Internal**

Menurut Mulyadi (2014:164) menyatakan bahwa ada 4 indikator pengendalian internal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Struktur Organisasi.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan.
- 3) Praktik yang sehat.
- 4) Karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Adapun penjelasan mengenai uraian di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas yang merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Sedangkan, menurut R.A. Supriyono (2018:160) terdapat 5 indikator pengendalian internal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Pengendalian.
- 2) Penilaian Risiko.
- 3) Aktivitas Pengendalian.
- 4) Informasi dan Komunikasi.
- 5) Aktivitas Pemantauan.

Adapun penjelasan mengenai uraian di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian serta landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.
- 2) Suatu peristiwa yang mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas di anggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan.
- 3) Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan.
- 4) Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.
- 5) Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi.

### 2.1.2 Audit Operasional

Terdapat banyak definisi tentang audit operasional yang dikemukakan oleh para ahli, berikut ini beberapa diantaranya

Menurut Agoes (2012:11) mendefinisikan audit operasional adalah sebagai berikut:

“Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah efektif, efisien dan ekonomis.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:52) mendefinisikan Audit operasional adalah sebagai berikut:

“Audit operasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek yang efisien, efektif dan ekonomis.”

Sedangkan Menurut Bayangkara I.B.K (2013:2) definisi audit operasional adalah sebagai berikut:

“Rancangan secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program, yang di selenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa Audit operasional adalah suatu proses pemeriksaan sistematis terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan untuk menilai berbagai kegiatan operasional dalam perusahaan tersebut sudah efektif, efisien dan ekonomis.”

### **2.1.2.1 Tujuan Audit Operasional**

Pada dasarnya audit operasional memiliki tujuan yakni membantu manajemen dalam memeriksa efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta menilai apakah cara-cara pengelolaan sudah berjalan baik atau tidak. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi tujuan operasional.

Menurut Mulyadi (2013:32) tujuan audit operasional adalah:

- 1) Mengevaluasi kinerja
- 2) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan.
- 3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

### **2.1.2.2 Indikator Audit Operasional**

Menurut Widjayanto (2006:16) audit operasional memiliki 3 indikator, yaitu:

- 1) Independensi Auditor.
- 2) Kompetensi.
- 3) Pelaksanaan Audit Operasional.

Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai uraian diatas sebagai berikut:

- 1) Independensi Auditor

Independensi harus dimiliki oleh setiap auditor guna dapat terpercayanya saran dan rekomendasi yang nantinya diberikan auditor setelah melakukan audit operasional.

## 2) Kompetensi

Kompetensi sangat diperlukan untuk menentukan masalah-masalah dan membuat rekomendasi yang sesuai. Kompetensi merupakan masalah utama bila audit operasional menyangkut masalah-masalah operasi yang mempunyai cakupan luas.

## 3) Pelaksanaan Audit Operasional

Audit operasional juga penting dilaksanakan karena hasil audit tersebut bisa berupa rekomendasi yang sangat berguna bagi pihak manajemen untuk menentukan dan menilai kebijakan dan kegiatan perusahaan apakah sudah tepat atau memerlukan rekomendasi untuk perbaikan sehingga berpengaruh terhadap hasil dan kegiatan operasional perusahaan.

Sedangkan menurut Randal J.dkk (2011:4) terdapat 4 indikator audit operasional, yaitu sebagai berikut:

- 1) Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.
- 2) Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.
- 3) Kompeten dan independen.
- 4) Pelaporan.

Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai uraian diatas:

- 1) Informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk melakukan auditing harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, kriteria untuk

mengevaluasi informasi juga bervariasi, tergantung pada informasi yang sedang diaudit.

2) Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti.

Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3) Kompeten dan independen.

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Selain itu, para auditor berusaha keras mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka.

4) Pelaporan.

Laporan seperti ini, memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberitahukan kepada para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

### **2.1.3 Efektivitas Pengelolaan Persediaan**

Menurut Hidayat (2019:23) mendefinisikan efektivitas pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut:

“Adalah aktivitas pencatatan yang akurat baik barang keluar maupun masuk dan menjadi hal penting dalam sistem produksi persediaan, berfokus pada tindakan yang dibutuhkan, selain itu memastikan ketepatan pengambilan

keputusan terkait dengan pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman agar lebih efektif, efisien dan juga ekonomis.”

Menurut Kuswadi (2008:127) efektivitas pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan persediaan adalah suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis, karena terlalu banyak atau sedikit persediaan tidak baik akan mengakibatkan kesulitan dalam memproduksi, maka menjaga keseimbangan pengelolaan persediaan sedemikian rupa sehingga tercapai stabilitas dalam proses produksi agar lebih efektif.”

Definisi pengelolaan persediaan menurut Dr. Sulaeman Rahman Nidar (2016:128) adalah sebagai berikut:

“Perusahaan memiliki pengelolaan persediaan dengan maksud untuk menjaga kelancaran operasinya. Bagi perusahaan dagang, persediaan perusahaan dapat memenuhi permintaan pembeli. Sedangkan bagi perusahaan industri, persediaan bahan baku dan barang dalam proses untuk memperlancar kegiatan produksi sedangkan persediaan barang jadi dimaksudkan untuk memenuhi permintaan pasar agar efisien dan ekonomis.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diartikan bahwa efektivitas pengelolaan persediaan adalah aktivitas pencatatan yang akurat baik barang keluar maupun masuk dan menjadi hal penting dalam system produksi persediaan juga menjaga keseimbangan pengelolaan persediaan sehingga tercapai stabilitas dalam proses produksi agar lebih efektif.

### **2.1.3.1 Tujuan Pengelolaan Persediaan**

Menurut Fadhilah (2012:30) tujuan pengelolaan persediaan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat (memuaskan konsumen).

- 2) Untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi.
- 3) Untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan laba perusahaan.
- 4) Menjaga agar pembelian secara kecil – kecilan dapat dihindari, karena mengakibatkan biaya menjadi besar.
- 5) Menjaga agar penyimpanan dalam gudang tidak besar – besaran, karena akan mengakibatkan biaya menjadi besar.

#### **2.1.3.2 Indikator Efektivitas Pengelolaan Persediaan**

Menurut Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (1997:430) menyatakan bahwa ada 7 indikator efektivitas pengelolaan persediaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penetapan tanggung jawab dan wewenang yang jelas terhadap persediaan.
- 2) Sasaran dan kebijakan yang dirumuskan dengan baik.
- 3) Fasilitas pergudangan dan penanganan dengan baik.
- 4) Klasifikasi dan identifikasi persediaan secara layak.
- 5) Standarisasi dan simplifikasi persediaan.
- 6) Catatan dan laporan yang cukup.
- 7) Tenaga kerja yang memuaskan.

Berikut ini penjelasan mengenai uraian diatas, sebagai berikut:

- 1) Penetapan tanggung jawab dan wewenang terhadap persediaan.

Dengan adanya pelimpahan wewenang, dan pengendalian persediaan dapat menunjang lancarnya siklus usaha dan jika terjadi kelalaian, pimpinan dapat mengetahuinya dan mengambil tindakan penanggulangan.

- 2) Sasaran dan kebijakan yang dirumuskan dengan baik.

Hal ini dapat mencegah adanya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas, misalnya masalah kebijakan umum yang mengatur akumulasi persediaan antara lain sampai sejauh mana diperkenankan pembelian spekulatif.

- 3) Adanya fasilitas pergudangan dan penanganan yang memadai.

Pengamanan dengan fasilitas pergudangan disertai dengan petugas khusus yang bertanggung jawab atas penyimpanan persediaan akan dapat mengamankan persediaan dari kerusakan, pencurian dan lainnya.

- 4) Klasifikasi dan identifikasi persediaan secara layak

Klasifikasi persediaan terdiri dari bahan baku, bahan perlengkapan, barang dalam proses, dan barang jadi. Klasifikasi ini diperlukan dalam penyusunan dalam anggaran.

- 5) Standarisasi dan simplikasi persediaan.

Standarisasi persediaan digunakan untuk mempermudah pengendalian persediaan (jenis, ukuran, dan sifat). Sedangkan simplikasi memudahkan untuk membedakan barang mana yang cepat dijual dan yang lambat perputarannya, untuk menghindari proses produksi yang tidak diperlukan.

- 6) Catatan dan laporan keuangan yang cukup.

Pengendalian didasarkan pada pengetahuan mengenai fakta, sehingga diperlukan pencatatan laporan yang menunjang informasi keuangan.

7) Tenaga kerja yang memuaskan.

Penetapan prosedur dan penyelenggaraan catatan pembukuan fisik yang baik tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh kecakapan manusia yang melakukannya.

Sedangkan menurut Maulina (2016:53) menyatakan bahwa ada 4 indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan persediaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem pencatatan persediaan.
- 2) Penilaian persediaan.
- 3) Nilai persediaan.
- 4) Kesalahan atas persediaan.

Berikut ini merupakan penjelasan mengukur efektivitas pengelolaan persediaan menurut Maulina (2016:53) adalah sebagai berikut:

1) Sistem pencatatan persediaan

Sistem pencatatan persediaan yang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku diperusahaan.

2) Penilaian persediaan

Penilaian persediaan terdiri dari dua syarat yakni kuantitas persediaan dan harga pokok persediaan yang harus terpenuhi dan telah sesuai dengan prosedur.

3) Nilai persediaan

Nilai persediaan yang diterapkan telah sesuai dengan prosedur perusahaan.

4) Kesalahan atas persediaan

Kesalahan atas persediaan masih umum ditemukan seperti kesalahan pencatatan, perhitungan fisik, kehilangan barang, penumpukan barang dan kerusakan barang.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan**

Menurut Jay Smith dan Fred Skousen (2001:327) menyatakan bahwa Dalam kaitannya dengan pengendalian intern, efektivitas pengelolaan persediaan merupakan pengelolaan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan bisnis yang normal, atau barang-barang yang akan dikonsumsi agar lebih efektif dalam pengolahan produk yang akan dijual untuk terjaga kualitasnya.

Menurut Lieviandi Adhi (2010:43) menyatakan efektivitas pengelolaan persediaan merupakan aktivitas yang jumlahnya dianggap material dan memiliki resiko yang cukup tinggi atas tindakan pencurian dan pemalsuan kualitas barang. Untuk itu, pengendalian internal atas pengelolaan persediaan perlu dilakukan dengan baik agar lebih efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Hoeriah Rabiatal Adawiah (2018) menyatakan bahwa Pengendalian internal berpengaruh sangat kuat terhadap efektivitas persediaan

bahan karena setiap evaluasi yang dilakukan oleh manajemen berjalan dengan cukup baik serta dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai salah satu cara pengawasan dan diambil keputusan. Sementara penelitian Muhammad Faisal (2016) menunjukkan bahwa pentingnya pengendalian intern dalam efektivitas pengelolaan persediaan barang karena menentukan kualitas persediaan barang yang dikelola gudang agar tidak menimbulkan adanya kerugian dalam bentuk kerusakan barang, timbulnya biaya-biaya tambahan dalam hal perawatan dan penyimpanan.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan persediaan karena pengelolaan persediaan yang baik dihasilkan dengan pengendalian internal yang baik juga.

### **2.2.2 Pengaruh Audit Operasional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan**

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:52) yang menyatakan bahwa Dalam menunjang terbentuknya efektivitas pengelolaan persediaan barang yang optimal dalam perusahaan diperlukannya audit operasional terhadap efektivitas pengelolaan persediaan barang, Audit operasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek yang efisien, efektif dan ekonomis.

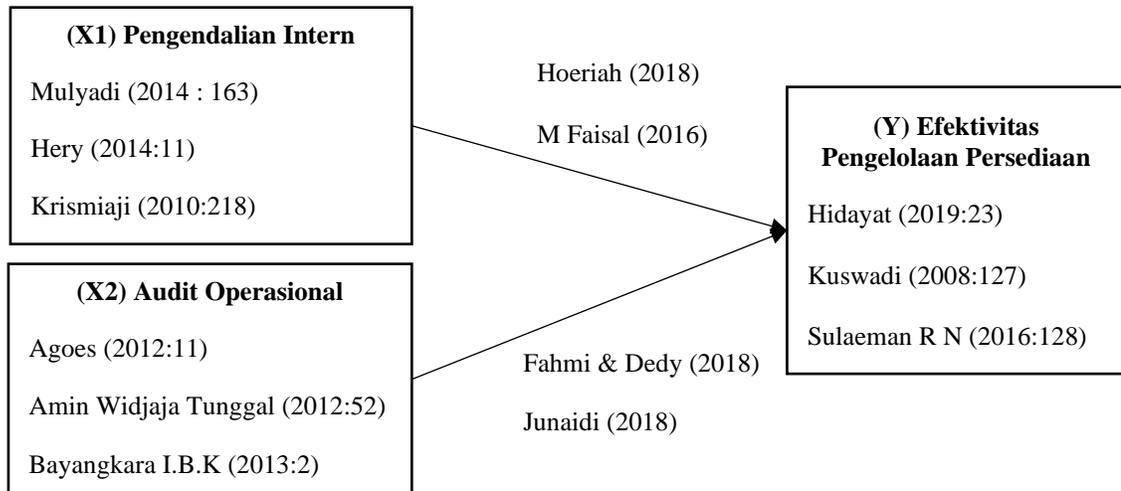
Menurut Agoes, S. (2008:173) yang menyatakan bahwa adanya audit operasional adalah untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan, Untuk menilai apakah persediaan perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan menilai efektivitas pengelolaan persediaan perusahaan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penerapan sistem prosedur persediaan barang dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektifitas dari kegiatan operasional perusahaan.

Audit operasional maupun prosedur persediaan barang dapat mempengaruhi terbentuknya persediaan barang yang efektif. Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh Audit operasional dengan efektivitas pengelolaan persediaan dilakukan oleh Fahmi dan Dedy (2018) yang menyatakan bahwa audit operasional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan persediaan, Sementara penelitian yang dilakukan oleh Juanidi (2018) yang menyatakan bahwa audit operasional memiliki hubungan yang signifikan terhadap kecukupan pengelolaan persediaan barang.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa audit operasional menunjang dalam efektivitas pengelolaan persediaan karena memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penerapan sistem prosedur pengelolaan persediaan.

### 2.2.3. Paradigma Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian, karena jawaban yang ditentukan baru berdasarkan teori, belum didasarkan pada fakta-fakta yang didapat melalui pengumpulan data atau kuesioner (Sugiyono, 2017:63).

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017:99).

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan.

H2 : Audit Operasional berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Persediaan.